



Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru

Analysis of Factors Affecting Management of Regional Property in Regional Apparatus Organizations (OPD) in Pekanbaru City Government

Ricardo^{1*}, Fitriani Astika², Doni Jepisah³.

¹²³STIKes Hang Tuah Pekanbaru, Program Studi Rekam medis dan Ilmu Kesehatan,
Jl. Mustafa Sari No 5, Tangkerang Selatan Pekanbaru

Email: *ricardo@http.ac.id

Article Info

Article history:

Received: 16 januari 2022

Accepted: 15 Juni 2022

Published: 20 Juni 2022

Keywords:

*Management; Regional;
Property; Apparatus;
Organizations.*

DOI:10.37859/jae.v12i1.3325

JEL Classification:

Abstrak

Tujuan penelitian ini menganalisis faktor yang mempengaruhi pengelolaan barang milik daerah di Pemerintah Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS dengan metode analisis model regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan Kualitas aparatur daerah berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan barang milik daerah dengan nilai signifikansi $(0,000) < (0,05)$ dan thitung $(9,225) > t_{tabel} (1,97796)$. Kepatuhan pada regulasi mempengaruhi pengelolaan barang milik daerah sebesar $(0,028) < (0,05)$ dan thitung $(-2,218) > -t_{tabel} ((1,97796))$. Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan barang milik daerah dengan nilai signifikansi $(0,877) > (0,05)$ dan thitung $(-0,155) > -t_{tabel} (1,97796)$. Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan barang milik daerah dengan nilai signifikansi. $(0,008) < 0,05$ dan thitung $(2,679) > t_{tabel} (1,97796)$.

This study is to analyze the factors that influence the management of regional property in the Pekanbaru City Government. This research uses the SPSS application with multiple linear regression analysis methods. The results of this research show that the quality of the regional apparatus has a significant effect on the management of regional property with a significance value of $(0.000) < (0.05)$ and tcount $(9.225) > t \text{ table } (1.977)$. Compliance with regulations has a significant effect on the management of regional property with a significance value of $(0.028) < (0.05)$ and tcount $(-2.218) > -t_{table} ((1.977))$. The use of information technology has no significant effect on the management of regional property with significance value $(0.877) > (0.05)$ and tcount $(-0.155) > -t_{table} (1.977)$. The government's internal control system has a significant effect on the management of regional property with a significance value of $(0.008) < 0.05$ and tcount $(2,679) > t_{table} (1,977)$.

PENDAHULUAN

Barang milik daerah (BMD) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 pasal 1 ayat (2) tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah mendefinisikan barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau perolehan lainnya yang sah.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah Kota Pekanbaru tahun 2016-2019 BPK RI menemukan permasalahan dalam pengelolaan BMD diantaranya Pencatatan dan penatausahaan persediaan di beberapa organisasi Perangkat daerah (OPD) belum tertib. Hal ini dapat dilihat dari hasil cek fisik pada beberapa OPD diketahui terdapat persediaan yang kurang catat sebesar Rp.455.652.952,00 dan lebih catat sebesar Rp.510.193.470,00 [21]. Permasalahan selanjutnya belum diserahkan terimaknya aset Dinas Pendidikan urusan Pendidikan Menengah kepada Pemerintah Provinsi Riau sesuai dengan amanah Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menggeser urusan pendidikan menengah atas dan kejuruan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi [22]. Pemanfaatan barang milik daerah tidak dituangkan dalam bentuk perjanjian, pinjam pakai barang milik daerah dilaksanakan bukan dengan pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya [24]. Penerapan pengendalian umum aplikasi pengelolaan aset tetap belum memadai. Hal ini terlihat dalam belum terintegrasinya aplikasi Sistem Informasi manajemen aset dengan sistem yang dipakai dalam pengelolaan keuangan daerah [23].

Penelitian sebelumnya yang menjadi research gap pada penelitian ini diantaranya yang dilakukan oleh [10] menyatakan bahwa kualitas aparatur daerah berpengaruh terhadap efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan aset daerah. Sebaliknya penelitian [5] Manajemen aset daerah tidak dipengaruhi oleh kualitas sumber daya aparatur. Menurut [5] dalam penelitiannya regulasi berpengaruh signifikan terhadap manajemen aset daerah. Menurut [8] Pemahaman dan kepatuhan aparatur terhadap regulasi merupakan hambatan utama terhadap pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah. Selain dari regulasi Hasil penelitian [5], menyatakan yang mempengaruhi secara signifikan terhadap manajemen aset daerah adalah sistem teknologi informasi.

Menurut [20] Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai pedoman sistem pengendalian, untuk memberikan jaminan yang memadai dalam pelaporan dan pengamanan aset agar menjadi baik. Dapat disimpulkan Kualitas Aparatur daerah, Kepatuhan terhadap peraturan pada regulasi, dan Pemanfaatan teknologi Informasi berpengaruh terhadap Pengelolaan BMD. Selain itu terdapat terdapat hasil penelitian yang berbeda pengaruh kualitas aparatur, kepatuhan terhadap regulasi terhadap pengelolaan BMD. Perlunya optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan SPIP dalam mendukung pengelolaan BMD di OPD Pemerintah Kota Pekanbaru.

METODE PENELITIAN

Jenis dari Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang sumber datanya adalah data primer, yaitu data yang diperoleh sampel dari responden dan data sekunder yang bersumber dari literatur, bahan bacaan dan buku berkaitan dengan pengelolaan barang milik daerah. Populasi dalam penelitian ini semua aparatur sipil negara (ASN) yang ada pada 46 (empat puluh enam) OPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Jumlah sample yang digunakan sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) responden. Responden terdiri dari masing-masing kepala OPD sebagai pengguna barang yang berfungsi sebagai pejabat pemegang kewenangan pengguna barang milik daerah. Selanjutnya kepala sub bagian umum sebagai pejabat penatausahaan barang yang mempunyai tugas dan fungsi tata usaha barang milik daerah pada Pengguna Barang. Responden ketiga adalah pengurus barang yang ada di setiap OPD di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru. Pengurus barang mempunyai

tugas mencatat seluruh barang milik daerah yang berada di masing masing SKPD yang berasal dari APBD maupun perolehan lain yang sah kedalam Kartu inventaris Barang (KIB) yang merupakan seorang pejabat fungsional umum. *Purposive random sampling* adalah metode yang dipilih dalam penelitian ini. Sample ditentukan sendiri oleh peneliti dengan sengaja berdasarkan kriteria tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Uji Validitas Data

Variabel	Pernyataan	r hitung	r tabel	keputusan
Pengelolaan Barang Milik Daerah	BMD1	0,530	0,1672	Valid
	BMD2	0,592	0,1672	Valid
	BMD3	0,510	0,1672	Valid
	BMD4	0,527	0,1672	Valid
	BMD5	0,538	0,1672	Valid
	BMD6	0,528	0,1672	Valid
	BMD7	0,377	0,1672	Valid
	BMD8	0,376	0,1672	Valid
	BMD9	0,518	0,1672	Valid
	BMD10	0,557	0,1672	Valid
	BMD11	0,529	0,1672	Valid
	BMD12	0,504	0,1672	Valid
	BMD13	0,545	0,1672	Valid
	BMD14	0,632	0,1672	Valid
	BMD15	0,630	0,1672	Valid
Kualitas Aparatur Daerah	KAD1	0,817	0,1672	Valid
	KAD2	0,802	0,1672	Valid
	KAD3	0,834	0,1672	Valid
	KAD4	0,671	0,1672	Valid
	KAD5	0,734	0,1672	Valid
	KAD6	0,837	0,1672	Valid
	KAD7	0,502	0,1672	Valid
Kepatuhan Pada Regulasi	KPR1	0,717	0,1672	Valid
	KPR2	0,700	0,1672	Valid
	KPR3	0,718	0,1672	Valid
	KPR4	0,739	0,1672	Valid
	KPR5	0,725	0,1672	Valid
	KPR6	0,726	0,1672	Valid
	KPR7	0,756	0,1672	Valid
	KPR8	0,773	0,1672	Valid
Pemanfaatan Teknologi Informasi	PTI1	0,597	0,1672	Valid
	PTI2	0,715	0,1672	Valid
	PTI3	0,655	0,1672	Valid
	PTI4	0,580	0,1672	Valid
	PTI5	0,700	0,1672	Valid
	PTI6	0,608	0,1672	Valid
	PTI7	0,650	0,1672	Valid
Sisntem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	SPI1	0,620	0,1672	Valid

SPI2	0,668	0,1672	Valid
SPI3	0,581	0,1672	Valid
SPI4	0,663	0,1672	Valid
SPI5	0,596	0,1672	Valid
SPI6	0,567	0,1672	Valid
SPI7	0,551	0,1672	Valid
SPI8	0,615	0,1672	Valid

Tabel 2. Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Nilai Kritis	Kesimpulan
Pengelolaan Barang Milik Daerah	0,811	0,6	Reliabel
Kualitas aparatur daerah	0,866	0,6	Reliabel
Kepatuhan Pada Regulasi	0,874	0,6	Reliabel
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,764	0,6	Reliabel
Sisntem Pengendalian Intern Pemerintah	0,748	0,6	Reliabel

Tabel 3. Uji t

Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)					
Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	35,489	4,351		8,157	,000
Kualitas Aparatur Daerah	,909	,099	,654	9,225	,000
Kepatuhan Pada Regulasi	-,313	,141	-,199	-2,218	,028
Pemanfaatan Teknologi Informasi	-,025	,162	-,012	-,155	,877
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	,430	,161	,268	2,679	,008

a. Dependent Variable: Pengelolaan Barang Milik Daerah

Tabel 4. Uji Hipotesis

Variabel	t _{hitung}	t _{tabel}	sig
H ₁ Kualitas aparatur daerah terhadap pengelolaan BMD	9,225	1,97796	,000
H ₂ Kepatuhan Pada Regulasi terhadap pengelolaan BMD	-2,218	1,97796	,028
H ₃ Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap pengelolaan BMD	-,155	1,97796	,877
H ₄ Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap pengelolaan BMD	2,679	1,97796	,008

Tabel 5 Koofisien Determinasi (R2)

Uji Koefisien Determinasi (R2)
Model Summary ^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.704 ^a	.496	.480	3,739

a. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kualitas Aparatur Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kepatuhan Pada Regulasi

b. Dependent Variable: Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pembahasan

Pengaruh Kualitas Aparatur Daerah Terhadap Pengelolaan BMD

Dari hasil uji analitis diatas menunjukan kualitas aparatur daerah thitung sebesar (9,225) lebih besar dari ttabel yaitu (1,97796) atau Sig. (0,000) < 0,05. Artinya pengelolaan bmd dipengaruhi oleh variabel kualitas aparatur daerah secara positif dan signifikan terhadap BMD. Hal ini dapat diartikan aparatur daerah yang berkualitas dapat meningkatkan pengelolaan BMD pada Pemerintah Kota Pekanbaru. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian primanovy (2016) yang menunjukan pengelolaan BMD dipengaruhi oleh kualitas aparatur daerah secara positif dan signifikan [9]. Penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan Haryanto (2013) yang menyatakan kemampuan sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan barang kuasa pengguna [11]. Siregar (2016) dalam penelitiannya juga menyatakan kualitas laporan barang milik daerah dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia secara positif dan signifikan [12]. Namun penelitian yang dilakukan oleh Azhar (2013) tidak selaras dengan hasil penelitian ini yang menyatakan bahwa manajemen asset tidak dipengaruhi oleh kualitas aparatur daerah [5].

Pengaruh Kepatuhan Pada Regulasi Terhadap Pengelolaan BMD

Dari hasil uji analisis kepatuhan pada regulasi mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap pengelolaan BMD pada Pemerintah Kota Pekanbaru. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji hipotesis thitung (-2,218) lebih kecil dari ttabel (1,97796) atau Sig. (0,028) < 0,05. Artinya pengelolaan BMD dipengaruhi secara signifikan oleh variabel kepatuhan pada regulasi. Dapat diartikan dalam mengelola barang milik daerah selalu berdasarkan kepada regulasi dan aturan yang telah ditetapkan agar pengelolaan BMD menjadi lebih baik dan optimal. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Azhar (2013) yang menunjukan kualitas pengelolaan BMD dipengaruhi oleh kepatuhan pada regulasi secara parsial dan signifikan [5].

Pengaruh Pemanfaatan teknologi informasi Terhadap Pengelolaan BMD

Berdasarkan tabel uji analisis diketahui thitung (-0,155) lebih -t tabel (1,97796) atau Sig. (0,877) > 0,05. Artinya variabel Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan BMD pada Pemerintah Kota Pekanbaru. Hal ini dimaksudkan bahwa teknologi informasi bukan merupakan faktor dalam mengelola barang milik daerah (BMD). Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh siregar (2016) menyatakan kualitas laporan barang milik daerah tidak dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi informasi secara negative dan tidak signifikan [12]. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Azhar (2013) yang menyatakan manajemen aset pada Kota Banda Aceh dipengaruhi secara positif dan signifikan. [5]. Hasil penelitian yang tidak sama dilakukan oleh primanovy (2016) yang menyatakan Pengelolaan barang milik daerah (BMD) tidak dipengaruhi secara signifikan oleh sistem informasi.

Pengaruh SPIP Terhadap Pengelolaan BMD

Dari hasil uji analisis yang dilakukan diketahui thitung (2,679) lebih besar dari ttabel (1,97796) atau Sig. (0,008) < 0,05. Artinya pengelolaan BMD Kota Pekanbaru di pengaruhi oleh Sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) secara positif dan signifikan. Hasil Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh siregar (2016) yang menyatakan bahwa SPIP berpengaruh positif dan signifikan mempengaruhi kualitas laporan barang milik daerah [12]. Hal ini menunjukkan pengelolaan barang milik daerah akan lebih baik apabila sistem pengendalian intern pemerintah berjalan dengan baik dan sesuai amanah dari Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2008.

SIMPULAN

Dari analisa data dan pembahasan, pengujian hipotesis dan pembahasan dapat disimpulkan Kualitas aparatur daerah, dan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan barang milik daerah pada Pemerintah Kota Pekanbaru. kepatuhan pada regulasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengelolaan barang milik daerah pada pemerintah kota pekanbaru. Sedangkan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengelolaan barang milik daerah pada Pemerintah Kota Pekanbaru.

SARAN

Dari hasil uji analitis dan pembahasan yang dilakukan maka saran untuk peneliti selanjutnya dengan menambahkan variabel lain yang memiliki hubungan dengan pengelolaan barang milik daerah, melakukan penelitian metode campuran antara kualitatif dan kuantitatif dan memperluas cakupan wilayah penelitian serta menambah sampel penelitian

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Basuki Adhibrata., 2016, Analisis Permasalahan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Wonogiri), Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. [13]
- Azhar, Iqlima, 2013. Pengaruh Kualitas Aparatur Daerah, Regulasi dan Sistem Informasi Terhadap Manajemen Aset (Studi Pada SKPD Pemerintah Kota Banda Aceh, *Tesis* Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. [5]
- Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Riau. 2017. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kota Pekanbaru TA 2016. [21]
- Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Riau. 2018. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kota Pekanbaru TA 2017. [22]
- Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Riau. 2019. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kota Pekanbaru TA 2018. [23]
- Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Riau. 2020. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kota Pekanbaru TA 2019. [24]
- Bryson, J. M., Ackermann, F., & Eden, C. (2007). Putting the Resource-Based View of Strategy and Distinctive Competencies to Work in Public Organizations. *Public Administration Review*, 67(4), 702-717. 1. [14]
- Darno, 2012. Analisis Pengaruh Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Barang Kuasa Pengguna (Studi pada Satuan Kerja di Wilayah Kerja KPPN Malang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya Malang*. Vol. 1 No. 1: Semester Ganjil 2012/2013. [25]
- Felix Christian., 2019, Analisis Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Merauke, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi, Manado, *Jurnal EMBA*, Vol. 7 No. 1 Januari 2019, Hal. 951-960. [19]
- Ghozali. I., 2013, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS21 Update PLS Regresi*, Edisi 7 (Cetakan VII), Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. [34]

- Hansen, J. R. (2007, October). Strategic Management when Profit isn't the End: Differences between Public Organizations. In *9th Public Management Research Conference, Tucson*. [15]
- Haryanto. 2013. Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Peningkatan Kualitas Pelaporan Aset Daerah. *Artikel 2, Buku Pengelolaan dan Akuntansi Keuangan Daerah, Hal. 30-51*. Semarang: UNDIP Press. [11]
- Hyemas., 2013, Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang). Universitas Tanjungpura, Pontianak. *Jurnal untan*. Vol.1 No.0001 (2013)/ E11211083, <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpmis/article/view/2507>. Diakses tanggal 24 Februari 2017. [26]
- Inayah, 2010. Studi Persepsi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Aset Daerah Di Kota Tangerang. *Tesis*. FISIP Universitas Indonesia. [10]
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Jakarta. [16]
- Koswara, 2001. *Dinamika Informasi dalam Era Global*. CV. Rajawali. Jakarta. [27]
- Lu, Yaotai, 2011, Public asset management: empirical evidence from the state governments in the united states, *Dissertation to the Faculty of The College for Design and Social Inquiry in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy*. [8]
- Mahayuddin dan Jeanny Maria Fatimah., 2016, Evaluasi Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (Simda-BMD) dalam Mendukung Inventarisasi Aset Daerah Di Kabupaten Majene, Universitas Hasnuddin, Makassar *Jurnal Komunikasi KAREBA*, Vol 5 No. 1 Januari-Juni 2016. [4]
- Martikawati Gubali, Jantje Tinangon, dan Rudy Pusung., 2018, Analisis Penatausahaan Barang Milik Negara Melalui Penggunaan Aplikasi Simak-BMN pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Manado, *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(3), 2018, Halaman 216-224. [17]
- Munaim, 2012. Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tugas Akhir Program Magister Administrasi Publik, Universitas Terbuka. [18]
- Nancy, 2015. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sigi, *Jurnal Katalogis*, Volume 3 Nomor 2. [3]
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. [29]
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. [32]
- Primanovy, Mega (2016), Analisis faktor faktor yang mempengaruhi kualitas pengelolaan barang milik daerah pada SKPD Pemerintah Kota Tebing Tinggi dengan komitmen pimpinan sebagai variable moderating, *Tesis Magister Ekonomi dan Bisnis universitas Sumatera Utara*. [9]
- Purwanto, Erwan A. dan Sulistyastuti, Ratih, 2012. *Implementasi Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Gava Media, Yogyakarta. [28]
- Ricardo., 2017, Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap Dengan Pendekatan *Soft System Methodology* (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Pekanbaru), Program Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau, Pekanbaru Tobing, L. Bonggas, "Judul Buku", Penerbit, edisi, 2003. (buku). [1]
- Rima Rachmawati, Dini Arwati., Shinta Dewi Herawati, dan Sendi Gusnandar Arnan., 2018, Optimalisasi Penggunaan Teknologi Informasi dalam Penatausahaan Asset/Barang Milik daerah, Fakultas Ekonomi, Universitas Widyatama, Bandung, *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, 10 (2), 2018, Halaman 189-197. [6]
- Siregar, sahrin (2016), Analisis Faktor faktor yang mempengaruhi kualitas laporan barang milik daerah dengan peran inspektorat daerah sebagai variable moderating pada SKPD di Pemerintahan Padang Lawas. *Tesis Magister Ekonomi dan Bisnis universitas Sumatera Utara*. [12]
- Sufri Nuryamin., 2015, Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul Tahun 2014-2015, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Tersedia di:

- <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/6115/Jurnal%20naskah%20publikasi.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Diakses 19 April 2018. [7]
- Sugiyono, (2014). Metode Penelitian kuantitatif dan kualitatif. [30]
- Suliyanto, (2011). Ekonometrika terapan; Teori & aplikasi dengan SPSS, Penerbit Andi, Yogyakarta. [31]
- Wibisono, Tri. 2009. Pengendalian Intern Atas Pelaporan Aset Negara. *Warta Pengawasan*, Vol. XVI, No. 2, Juni 2009, BPKP. [20]
- Yogi Ikhwanto., 2016, Pengembangan Desain Instrumen Pemantauan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Program Magister Akuntansi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. [2]
- Yusuf, M, 2010. Delapan Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik, Salemba Empat, Jakarta. [33]